

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu wujud perubahan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang layak. Hal ini akan menciptakan peluang besar bagi masyarakat terutama pengusaha dan pengrajin industri kecil dan kerajinan rumah tangga untuk memperbaiki taraf hidup keluarga demi tercapainya keinginan, kebutuhan, keselamatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pembangunan disini ditujukan pada suatu peningkatan industri dalam perbaikan pendapatan daerah agar industri seperti : industri tekstil, industri mebel rotan, industri kayu jati dan sebagainya supaya nantinya dapat hidup lebih sempurna.

Pembangunan industri ditujukan untuk memandirikan perekonomian nasional, meningkatkan kehidupan masyarakat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing antar pengelolaan industri lain seperti industri tekstil industri mebel rotan , industri kayu jati. Selain itu juga perlu diarahkan untuk perbaikan struktur perekonomian daerah dengan membentuk kekuatan- kekuatan industri yang saling menompang dan bekerjasama, sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih meningkat sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dengan mempergunakan bahan- bahan baku yang lebih unggul serta bahan- bahan pendukung lainnya dari dalam negeri.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dalam hal

... ..

sumber daya manusia dan sumber daya alam terutama yang terdapat di pedesaan, khususnya industri kecil yang ada di masyarakat. Kemampuan dan kemauan mereka guna menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini untuk menarik daya beli rakyat pedesaan dan sebagai pendukung pasar dalam negeri dan luar negeri yang potensial

Hal ini dikarenakan karena industri kecil mampu memenuhi selera para pelanggan/konsumen melalui kekhususan produksi dan penyajian barang yang berkualitas.

Usaha yang terarah bagi peningkatan industri kecil khusus yang di harapkan bagi perbaikan ekonomi masyarakat dengan mengupayakan sektor tersebut serta strategi yang disebutkan untuk meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat antara lain pengembangan serta peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu barang dengan tujuan memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di daerah pedesaan.

Dan di dunia Internasional, Industrialisasi merupakan suatu hal yang di banggakan karena ada perbaikan atau perubahan menuju kehidupan industrisasi dengan keberhasilan suatu masyarakat dalam sektor industri. Hal ini untuk mewujudkan kemakmuran dan kehidupan yang relatif lebih tinggi dengan penghasilan yang tinggi pula. Dan di samping itu juga Industrialisasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kehidupan baru bagi masyarakat dan pada gilirannya akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi secara nasional dan

Dengan adanya ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus memberikan dukungan dan bantuan modal berupa kredit simpan pinjam dana bergulir maupun bantuan secara hibah dari pemerintah Kabupaten atau Propinsi, bantuan peralatan mesin sederhana maupun canggih untuk peningkatan produksi industri kerajinan mebel rotan di desa Trangsan. Jadi dalam industri kecil sebagaimana kerajinan mebel rotan perlu di beri kemudahan baik dalam bantuan perizinan usaha industri, pembinaan meliputi bimbingan, pelatihan dan pendidikan maupun dalam jaringan pemasaran barang jadi untuk meningkatkan hasil dan usaha industri tersebut.

Bahkan dalam pelaksanaannya perlu diusahakan peningkatan agar proses industri dan ekonomi agar menjadi kuat dengan mempererat kaitan antar industri dengan sektor kehidupan serta pembangunan desanya.

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diharapkan dalam hal sebagai berikut :

1. Memberi bantuan permodalan bagi pengrajin berupa kredit simpan pinjam, modal yang secara bergulir maupun hibah agar nantinya bisa di manfaatkan sebaik mungkin.
2. Pemberian bantuan peralatan sederhana maupun canggih berupa mesin pules, mesin split, dan alat pendukung lainnya agar mempercepat proses produksi yang lebih optimal. Bantuan tersebut di dapat dari pemerintah Kabupaten dan Propinsi Jawa Tengah berupa uang 200 juta dan 100 juta untuk kegiatan industri ini.
3. Di berlakukannya Peraturan Daerah NO 8 tahun 2003 tentang Restribusi Tarif Ijin Usaha Industri di berbagai kalangan pengrajin, seperti indusrti mebel rotan,

4. Membantu pemasaran hasil olahan industri dengan cara memberikan kesempatan kepada pengusaha pada saat ada pameran- pameran industri kerajinan di daerah- daerah lain atau event-event lainnya untuk bisa sampai ke mancanegara.
5. Memberikan pembinaan berupa penyuluhan dan bimbingan bagi pengrajin industri kerajinan guna memajukan manajemen koperasi dalam perolehan kredit usaha, manajemen ekspor impor usaha industri.
6. Membantu menyediakan sarana jalan yang baik agar pengangkutan bahan baku pemasaran hasil produksi mebel rotan dari dalam maupun dari luar daerah agar lebih lancar proses industrinya.

Jadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya membantu pembangunan dan peningkatan industri kecil seperti industri mebel rotan, industri tekstil, industri mebel kayu jati juga perlu diberi pembinaan yang sama terhadap industri kecil di wilayah desa lainnya, sehingga industri-industri tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Pembinaan dan bantuan oleh pemerintah daerah terhadap industri adalah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya, sehingga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang akrab antara masyarakat dengan petugas pemerintah yang pada akhirnya akan dapat mendorong kemajuan industri tersebut. sebagaimana diketahui pembangunan jangka panjang oleh pemerintah yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi, dimana industri kecil juga termasuk di dalamnya, maka bilamana industri kecil seperti kerajinan mebel yang berada di Trangsan dapat maju dan berkembang, maka akan terciptalah lapangan kerja yang lebih luas, sehingga masyarakat di desa tersebut dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang dapat memberi kesempatan bekerja bagi

Dan keseluruhan keterangan diatas, bahwa kebijakan pemerintah menyangkut peningkatan dan memajukan industri adalah dengan cara melalui sebuah organisasi atau lembaga yang mempunyai fungsi pelaksana kebijakan pemerintah di bidang industri dan perdagangan yaitu Departemen Perindustrian dan perdagangan serta koperasi. Dimana koperasi disini sebagai pelaksana dan pembina jalannya perekonomian daerah dalam pengembangan industri seperti : mebel rotan , tekstil, kayu jati maupun makanan khas Sukoharjo dan sekitarnya. Namun itu semua harus ada dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembinaan serta pertumbuhan ekonomi daerah agar nantinya dapat menjadi tumpuan bagi negara dalam penyediaan lapangan pekerjaan usaha industri yang lebih berpotensi

Kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan koperasi tidak berarti pemerintah turut campur tangan dalam urusan dalam (*intern*) koperasi, kebebasan gerak koperasi tetap terjamin sesuai dengan demokrasi ekonomi, hanya karena koperasi sebagai pelaksana dan pembina kehidupan demokrasi untuk meningkatkan tingkat kehidupan rakyat (materiil dan mental) masih banyak mengandung kelemahan-kelemahannya (modal, tenaga terdidik, pemasaran). Oleh karena itu pemerintah memberikan dorongan dan bantuan-bantuan, sebagai layaknya dorongan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap alat-alat perekonomian lainnya.

Jadi dengan demikian dalam GBHN NO. II/MPR/1983, menyebutkan bahwa koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Dengan ini akan makin di kembangkan dan di perkuat dalam menumbuhkan ekonomi dan industri seperti : mebel rotan, mebel kayu jati, tekstil maupun makanan khas

Sukoharjo dan sekitarnya agar lebih meningkat sampai ke manca negara. Usaha – usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan, pendidikan, pelatihan koperasi maupun industri agar menjadi koperasi simpan pinjam maupun koperasi industri yang menyediakan kebutuhan industri seperti : peralatan, modal usaha dan simpan pinjam dana koperasi. Jadi dengan demikian dorongan, bantuan dari pemerintah maupun lembaga- lembaga lainnya seperti : bank swasta, bank pemerintah maupun bank- bank lain guna mempercepat proses pengembangan usaha industri agar produk dan perbaikan mutu industri baik kecil , menengah, maupun besar lebih berpotensi.

Koperasi sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan terutama perekonomian masyarakat umum. Dan kebijakan pemerintah dalam perkoperasian lebih diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu koperasi menjadi organisasi yang tangguh didukung manajemen yang potensial dan terjalannya unsur-unsur material dan idil secara serasi dan merata.

Usaha-usaha tersebut harus disertai dengan pembinaan, agar kegiatan koperasi dan peranan anggota koperasi makin meningkat, sehingga manfaat koperasi makin dinikmati oleh anggotanya, dan peranan koperasi di dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi semakin baik dan besar. Dalam melaksanakan pembinaan koperasi diutamakan koperasi-koperasi unit desa.

Jadi dengan demikian semua kegiatan industri tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, baik berupa penyuluhan-penyuluhan atau pembinaan-pembinaan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan yang berarti bagi

perkembangan industri kecil menengah menengah ke atas di daerahnya

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan suatu rumusan masalah yang akan di teliti yaitu: APA SAJA KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN MEBEL ROTAN DI DESA TRANGSAN KECAMATAN GATAK TAHUN 2003-2004?

C. Kerangka Dasar Teori.

Kerangka dasar teori adalah: suatu teori yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk lebih memperdalam penulisan dan pemahaman skripsi, sehingga segala jenis kegiatan akan menjadi lebih jelas, sistematis dan ilmiah.

Menurut Sofyan Effendi.¹

Teori adalah merupakan unsur penelitian yang paling besar perannya bagi penelitian karena dalam unsur inilah peneliti mencoba untuk menerangkan fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya.

Dan pada dasarnya teori itu sendiri merupakan segugusan konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan yang menyatakan suatu pandangan sistematis tentang gejala dengan merinci hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena.²

Dengan memperhatikan dari uraian di atas mengenai pengertian teori, maka uraian tersebut telah memberikan suatu gambaran dalam menganalisa suatu data untuk melengkapi skripsi mengenai peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan industri kecil kerajinan mebel rotan.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan tema skripsi, antara lain :

¹ Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.39

1. Desentralisasi

Secara etimologis desentralisasi berasal dari bahasa latin "de" yang berarti berlepas dan "centrum" yang berarti pusat, dengan demikian konsep desentralisasi dapat diartikan sebagai perlimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut The Liang Gie, desentralisasi dalam bidang pemerintahan sebagai suatu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah.³

Sedangkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yaitu daerah kabupaten dan daerah kota. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah kota dan kabupaten, sebab pemerintah daerah lebih mengutamakan pelaksanaan pada asas desentralisasi.

Selain itu desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan teknik ini, sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah otonomi menjadi urusan rumah tangganya. Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan (perencanaan, pembiayaan, personil dan sebagainya) urusan tersebut. Daerah juga berwenang melakukan pengaturan rumah tangganya dengan jalan mengeluarkan peraturan daerah.⁴

³ The Liang Gie dalam buku Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 44.

⁴ The Liang Gie, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 44.

Adapun alasan perlu dilaksanakan desentralisasi pada suatu negara, sebagai berikut :

- a. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.
- b. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat perekonomian dan pembangunan di daerah.
- c. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
- d. Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang industri, sosial, politik dan pemerintahan.
- e. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, adalah :

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di kota kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan pada daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Dalam bentuk operasional pemerintahan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berfungsi untuk menjalankan semua kewenangan pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pengadilan. Sedangkan yang

dilaksanakan oleh daerah kabupaten daerah dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan pendidika dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Jadi dengan demikian sistem desentralisasi akan membawa dampak yang baik dan efektifitas bagi pemeritahan karena tugas pemerintahan tidak hanya berada di pusat saja tetapi juga diberikan pada daerah serta mewujudkan pembangunan daerah secara merata dan adil bagi rakyat. Dimana pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab dan dapat mengatasi berbagai masalah dan mereka ditantang untuk kreatif menemukan solusi dan berbagai masalah yang dihadapi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun dasar pemikirannya yaitu pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu

daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, layanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan peran tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewenangan menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

2. Pemerintah

Pemerintahan dan pemerintah memiliki istilah yang berbeda, tetapi kedua-duanya mempunyai arti yang sama. Namun kita harus membedakannya.⁶

- a. Istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas pekerjaan.
- b. Istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ, aparat, alat perlengkapan yang menjalankan fungsi itu.

Tetapi biasanya yang di maksud dengan pemerintah adalah apa yang lazim disebut kabinet atau dewan menteri atau kepala negara beserta menteri-menteri. Jadi organ negara yang mempunyai tugas pokok dalam bidang eksekutif.

⁵ Undang-undang Otonomi Daerah 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung, hal. 165.

⁶ *Media: Apa yang Harus Diperhatikan Saat Bersejarah UGM Yogyakarta*, 1970, hal. 5

Dan kata pemerintah memiliki empat unsure yaitu :⁷ ada dua pihak yang tergabung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki suatu ketaatan dalam bertugas.

Istilah pemerintah bisa kita bagi ke dalam empat pengertian :⁸

- a. Pemerintah mengacu kepada proses memerintah, yakni : pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
- b. Untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
- c. Pemerintah acapkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
- d. Mengacu kepada bentuk, metode atau system pemerintahan dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu pemerintah tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur kekuasaan, jabatan dan masyarakat yang di perintah sesuai dengan tata aturan yang telah di buat dan berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan (*authority*) agar proses pelaksanaannya dijalankan sesuai aturan- aturan yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peran pemerintah dalam rangka pembinaan industri kecil itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan-peraturan yang dapat

⁷ H. Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, cetakan kedua (edisi revisi), Agustus 2001, hal 20.

menghalang-halangi tercapainya tujuan dan maksud dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Trangsan dalam mengelola industri kecil kerajinan mebel rotan supaya kehidupannya lebih baik demi tercapainya kebutuhannya dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga untuk meningkatkan taraf perkembangan ekonomi yang ada di kalangan masyarakat, di mana masyarakat desa Trangsan adalah bagian dari unsur bangsa dalam suatu negara yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain

Dengan demikian peran pemerintah dapat ditingkatkan dalam setiap pelaksanaan pembinaan industri kecil, karena hal ini ada unsur keterkaitan satu sama lain atau hubungan timbal balik, dimana keduanya dapat berinteraksi dengan tujuan mendekati pada kemakmuran masyarakat. Dan pemerintah disini sebagai pelaku utama sekaligus pendorong bagi kemajuan rakyat/masyarakat desa dalam melaksanakan usaha industri kecil dalam lingkungan pemerintah daerahnya.

Pemerintah Kabupaten

Menurut Masyuri Maschab, yang di maksud dengan Pemerintah Kabupaten adalah suatu alat negara atau aparatur negara yang memiliki kewenangan memerintah dalam suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas negara/wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten adalah suatu organisasi yang memiliki hak, kewenangan. Dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing.⁹

⁹ Maschab Masyuri, *Pemerintah Di Daerah*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1982, hal.32.

Sedangkan menurut James E. Anderson, menyebutkan bahwa *policy* adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan satu masalah tertentu.¹³

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian yang memiliki tujuan, maksud dan orientasi pada maksud dan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu juga memiliki kekuatan hukum yang syah, dimana mengikat pada seluruh masyarakat, karenanya harus mendahulukan kepentingan rakyat.

5. Industri

Industri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1984 adalah sebagai berikut :

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih baik untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.¹⁴

Sedangkan menurut Bintoro bahwa :

Industri adalah usaha yang merupakan unit produksi yang membuat suatu barang atau mengerjakan suatu badan/tempat tertentu untuk keperluan masyarakat.¹⁵

Lain hal menurut GBHN menyatakan bahwa :

Industri penghasil bahan baku, komponen, dan bahan penolong untuk terus makin ditingkatkan guna memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing, sehingga mengurangi ketergantungan pada import.¹⁶

¹³ Affan Gaffar, *Policy Process dan Formulation*, Model Program MPA Universitas Tujuhbelas Agustus 1945, Surabaya, hal. 6.

¹⁴ Undang-Undang No.5 tahun 1984, Republik Indonesia dalam buku Ibnu Syamsi, *Ensiklopedi Umum dan Pembangunan*, FISIP, UGM, Yogyakarta, 1986, hal.49.

¹⁵ Bintoro, *Suatu Pengantar Geografi Desa*, UP SPRING, Yogyakarta, 1977, hal.38.

¹⁶ BP-7 PUSAT, Jakarta, 1993, hal.11.

e. Permodalan

Adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi untuk output. Dan modal dalam sebuah industri berperan sangat penting karena bisa membiayai dan memberikan sarana terhadap kelangsungan proses produksi. Apalagi modal tersebut berupa dana dari pemerintah untuk lebih ditingkatkan usaha industri tersebut.

f. Pemasaran

Suatu hal yang sangat penting bagi industri demi kelancaran dalam mempromosikan barang-barang industri untuk di pasarkan ke masyarakat guna menarik simpatik atau pelanggan melalui media massa, pameran, agar produksi yang dihasilkan akan tersalurkan, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Oleh karena itu sistem pemasaran sangat mendorong keberhasilan suatu industri, apalagi kalau didukung oleh pemerintah dalam hal pembiayaannya.

1) Industri Kecil

Menurut HY. Kumanto bahwa :

Industri kecil adalah sebagai suatu proses produksi yang di dalamnya ada perubahan bentuk produksi atau sifat barang, dalam proses itu bersifat manusia dengan kelakuannya lebih menentukan pada factor alam.¹⁷

Selain itu juga industri kecil adalah usaha atau kegiatan yang menggunakan mesin dan juga tenaga pengrajin/buruh yang jumlahnya bisa sampai empat atau sembilan orang (memakai mesin tenaga).¹⁸

¹⁷ HY. Kumanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, penerbit Bina Pustaka, Jakarta, 1996, hal.303.

¹⁸ N. Nuoman Bertha, *Memperkuat Daya dan Penguasaan Daya Bersaing CHALFA Indonesia*, Jakarta, 1996, hal. 100.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa industri kecil adalah suatu kegiatan yang lebih menentukan pada kemampuan manusia atau dengan menggunakan mesin yang di dapat dari bantuan modal pemerintah, dimana didalamnya ada perubahn sifat barang serta memiliki pengrajin yang jumlahnya tidak terbatas dan handal. Selain itu juga industri kecil yang dalam proses produksi dan kegiatannya menggunakan teknologi yang sangat sederhana dengan memperkerjakan 5 sampai 25 orang pekerja.

Sedangkan dalam makalah seminar tentang beberapa aspek industri kecil di Indonesia yang diadakan di Cipanas, bulan Juli (1995:68) menyebutkan yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang berskala kecil dan industri rumah tangga yang diusahakan terutama untuk menambah pendapatan keluarga.¹⁹

Dan berdasarkan eksistensi dinamis, industri kecil dan kerajinan rumah tangga Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

a) Industri lokal

Yaitu jenis kelompok industri yang menguntungkan kelangsungan hidupnya kepada pasar setempat yang terbatas, serta relatif tersebar dari segi lokasinya.

b) Industri sentra

Yaitu kelompok jenis industri yang dari segi satuan mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan/kawasan industri yang terdiri dari kelompok unit yang menghasilkan barang yang sejenis dari kumpulan unit yang menghasilkan barang yang sejenis.

19. YIIS-EUR, *Seminar tentang Beberapa Aspek Industri kecil di Indonesia, Cipanas, Juli, 1995.*

terdiri dari kelompok unit yang menghasilkan barang yang sejenis dari kumpulan unit yang menghasilkan barang yang sejenis.

c) Industri mandiri

Yaitu kelompok jenis industri yang masih mempunyai sifat-sifat industri namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih.

Dari ketiga kategori di atas, industri kecil kerajinan mebel rotan termasuk dalam industri sentra, karena berada dalam satu kawasan/ lingkungan industri, dimana setiap rumah penduduk memiliki industri tersebut. Dan bisa juga dikategorikan dalam industri mandiri, karena proses kerjanya menggunakan mesin yang berteknologi canggih dan akan mempermudah kegiatan industri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan atau pendapatan selama bekerja sebagai pengrajin, terutama pada bidang industri kecil kerajinan mebel rotan akan menambah kebutuhan hidup yang belum terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga industri kecil disini untuk meningkatkan nilai tambah yang ditujukan untuk :²⁰

- a) Menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Meningkatkan ekspor dan menghemat devisa.
- c) Peningkatan penguasaan teknologi

²⁰ Gembong Tjitrosoepomo, dkk, *Industri Pedesaan Dan Masalah Pengembangannya*, Penerbit Universitas Widyadarmasurabaya, Surabaya, 1988, hal. 155

yang sudah dihaluskan terlebih dahulu dan dapat dipadukan dengan bahan kayu yang sudah jadi, seperti kursi, meja, lemari, lampu gantung, tempat tidur santai, keranjang hias ataupun lampu hias dan sebagainya.

Jadi rotan adalah tumbuhan yang menjalar yang batangnya digunakan untuk keperluan berbagai keperluan barang atau perabot (kursi, meja, tali, gelang dan sebagainya)²¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa industri kerajinan mebel rotan adalah industri yang bahan bakunya berasal dari rotan yang lebih difokuskan pada kerajinan atau ketrampilan tangan manusia untuk dianyam atau menggunakan alat yang lebih canggih maupun alat-alat tradisional. Hal ini dikarenakan rotan merupakan sumber kekayaan alam yang ada dan mudah diperoleh di hutan Indonesia di mana memiliki fungsi sangat besar serta mengandung unsur karya seni untuk dijadikan barang-barang perabot rumah tangga.

Keseluruhan dari itu semua dapat digunakan, dimanfaatkan dan dipakai oleh siapa saja termasuk konsumen/masyarakat karena mudah didapat di toko meubel, pasar tradisional, pameran-pameran maupun dalam acara-acara tertentu. Dan semua hasil karya rotan yang telah jadi dapat digunakan lebih lama apabila pemakaiannya dan perawatannya dijaga sebaik mungkin. Selain itu juga barang-barang tersebut dapat dibeli dengan harga terjangkau sebab hal itu merupakan hasil kebudayaan Indonesia dan hasil karya tangan dari para pengrajin rotan.

²¹ Lukman, Ali: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diperkaya Dalam Bentuk* ...

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian, meliputi :
 - a. Pembinaan teknologi tepat guna, pembinaan manajemen ekspor dalam pembentukan dan pengembangan GKM (Gugus Kendali Mutu).
 - b. Pembinaan manajemen pemasaran, mengenai standar harga produk mebel rotan di pasaran, pembinaan manajemen teknis dalam pemberdayaan basis produksi dan distribusi.
 - c. Pembinaan dari Dinas Pelayanan Koperasi Propinsi Jawa Tengah, BFEN mengenai manajemen usaha dengan mutu ISO 9000.
 - d. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dalam tenaga trampil mengenai kemudahan dan perlindungan kepada koperasi dalam kredit modal kerja/ simpan pinjam.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian, mengenai pemberian izin usaha dan retribusi izin usaha industri, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1 yaitu ijin yang wajib diperoleh dalam pendirian perusahaan industri dan kegiatan usaha industri wajib membayar tarif retribusi ijin yang harus disesuaikan dengan industri kecil, menengah sampai industri besar.
 - b. Surat Ijin Tertib Usaha wajib untuk dilaporkan semua hasil penjualan mebel rotan dari produsen/pengusaha sebesar 30% serta wajib mendaftarkan ulang

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian, meliputi :
 - a. Pembinaan teknologi tepat guna, pembinaan manajemen ekspor dalam pembentukan dan pengembangan GKM (Gugus Kendali Mutu).
 - b. Pembinaan manajemen pemasaran, mengenai standar harga produk mebel rotan di pasaran, pembinaan manajemen teknis dalam pemberdayaan basis produksi dan distribusi.
 - c. Pembinaan dari Dinas Pelayanan Koperasi Propinsi Jawa Tengah, BFEN mengenai manajemen usaha dengan mutu ISO 9000.
 - d. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dalam tenaga trampil mengenai kemudahan dan perlindungan kepada koperasi dalam kredit modal kerja/ simpan pinjam.

2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian, mengenai pemberian izin usaha dan retribusi ijin usaha indutri, meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1 yaitu ijin yang wajib diperoleh dalam pendirian perusahaan industri dan kegiatan usaha industri wajib membayar tarif retribusi ijin yang harus disesuaikan dengan industri kecil, menengah sampai industri besar.
 - b. Surat Ijin Tertib Usaha wajib untuk dilaporkan semua hasil penjualan mebel rotan dari pengrajin/pengusaha sebesar 20% serta wajib mendaftarkan ulang

E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Winarno Surachman, yaitu:

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik tertentu. Cara utama yang digunakan selalu penyusunan perhitungan kewajaran dituju dari tujuan penelitian.²²

Metode penelitian dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial, untuk menerangkan fenomena tersebut. Penelitian memerlukan logika observasi atas fakta-fakta.²³

Adapun tujuan-tujuan dalam penelitian, sebagai berikut :

a. Bersifat Umum

Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan serta dukungan yang dilakukan agar peningkatan industri kecil kerajinan mebel rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak dapat lebih berpotensi.

b. Bersifat Khusus

Untuk mengetahui apa dan bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pembinaan industri kecil kerajinan mebel rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak dalam peningkatan usaha industri di pedesaan.

²² Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Rersearch*, Penerbit CV. Tarsito Bandung, 1978 hal. 139.

²³ Sofyan Effendi *Metode Penelitian Survei*, Penerbit IPRES Jakarta, 1991 hal. 16

4. Obyek Penelitian

Dalam penelitian obyek yang dituju adalah 50 para pengrajin/pengusaha industri mebel rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak untuk mendapatkan informasi dengan menyebar kuesioner dan tanya jawab langsung kepada beberapa pengrajin/pengusaha mebel rotan untuk memberi masukan data agar keterangan yang telah diberikan dapat dijadikan data yang akurat, jelas dan mudah dipahami.

5. Unit Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pembinaan industri kecil mebel rotan, maka dibutuhkan masukan-masukan data untuk melengkapi pembuatan skripsi. Sebagai obyek penelitian adalah :

- a. Pengrajin mebel rotan desa Trangsan.
- b. Pegawai Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
- c. Pegawai koperasi desa Trangsan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen yang sangat penting dalam melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis data yang akan mendukung penelitian dan pembuatan skripsi. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁴

²⁴ Marzuki, Drs. Metodologi Penelitian, PPSF UIR, 1996, hal. 100.

Wawancara dengan :

No.	Nama	Profesi
1.	Bapak. Tri Winarno	Staf Sub Dinas Perindustrian Bidang Aneka Industri
2.	Bapak Tri Setyo Aji Nugroho	Wakil Kepala Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo
3.	Bapak Warsino	Pengrajin/pengusaha mebel rotan
4.	Bapak Darminto	Staf Kelurahan Desa Trangsan
5.	Bapak Suroso	Staf Sub Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo
6.	Bapak Marjono	Pengrajin/Pengusaha mebel rotan
7.	Mbak Becti Irawati	Staf Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Jaya"
8.	Bapak Sutiman	Seksi Ekspor dan Impor Sub Dinas Perdagangan
9.	Bapak Joko Tridodo	Kepala Sub Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo

b. Observasi

Yaitu peninjauanm atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian secara sistematis terhadap gejala dan fenomena alam pedesaan yang akan diselidiki. Observasi disini akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar daerah tersebut dan industri mebel rotan yang selama ini berkembang di Desa Trangsan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.

c. Quesioner

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan menyebarkan pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan responden. Kegiatan teknik ini akan diberikan kepada responden yaitu pekerja/pengrajin industri dan pengusaha industri untuk mendapatkan informasi, antara lain :

No	Nama	Keterangan	Alamat
1	Bapak Warsino	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Luang
2	Bapak Suparno	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Luang
3	Bapak Margiyono	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Trangsang
4	Bapak Slamet	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Trangsang
5	Bapak Marjono	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Luang
6	Bapak Trimo	Pengrajin/pengusaha yang potensial	Desa Luang

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan oleh penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif, maka penyusunannya menggunakan analisa data kualitatif yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari para 50 responden para pengrajin mebel rotan di lokasi penelitian. Dan setelah data-data terkumpul dengan sempurna selanjutnya akan dipaparkan secara kualitatif, dimana dalam mengevaluasikannya dengan kalimat, skema, tabel-tabel. Dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif, maka data yang didapat selama penelitian tidak dijabarkan atau ditampilkan dengan angka-angka melainkan dalam bentuk tabel yang penyajiannya akan dijelaskan dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Dan kemudian diklasifikasikan secara logis, akurat untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Dengan maksud dan tujuan untuk mengorganisasikan, mengatur dan mengurutkan data ke dalam kategori maupun satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan teori dari data-data yang ada.